

TINJAUAN HUKUM PUTUSAN TINDAK PIDANA DESERSI OLEH
ANGGOTA MILITER DITINJAU
DARI ASAS PEMBINAAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG)

Anak Agung Istri Agung Vidya Berliana¹, Ariesta Wibisono Anditya²

INTISARI

Penelitian ini membahas tinjauan hukum terhadap putusan tindak pidana desersi oleh anggota militer di lingkungan TNI Angkatan Udara, khususnya pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, dengan fokus pada penerapan asas pembinaan dalam penjatuhan putusan. Penelitian menggunakan enam putusan pengadilan sebagai objek kajian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan undang-undang, sehingga dapat menggambarkan bagaimana kekuatan mengikat putusan hakim terbentuk, baik pada persidangan yang dihadiri terdakwa maupun tidak sesuai ketentuan hukum militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pembinaan menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku desersi, di mana hakim tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan, disiplin, dan reintegrasi prajurit ke dalam satuan. Faktor-faktor seperti motif pelaku, durasi ketidakhadiran, sikap kooperatif, serta kondisi sosial dan keluarga turut memengaruhi berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini merekomendasikan agar penegak hukum militer lebih memperhatikan keseimbangan antara aspek hukum dan pembinaan dalam setiap putusan, guna mendukung profesionalisme dan stabilitas institusi militer di Indonesia.

Kata Kunci: Desersi, Hukum Militer, Asas Pembinaan

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Ahtmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Ahtmad Yani Yogyakarta

***Legal Review of Court Decisions on the Crime of Desertion by Military
Personnel from the Perspective of the Principle of Rehabilitation
(A Study of Decisions by the Military Court II-09 Bandung)***

Anak Agung Istri Agung Vidya Berliana¹, Ariesta Wibisono Anditya²

ABSTRACT

This research discusses the legal review of court decisions on the crime of desertion committed by military personnel in the Indonesian Air Force, particularly at the Military Court II-09 Bandung, with a focus on the application of the principle of rehabilitation in sentencing. The research analyzes six court decisions as its primary objects. The normative juridical method is used, employing case study, comparative, and statutory approaches to illustrate how the binding force of judicial decisions is formed, whether the defendant is present or absent as regulated by military law. The results show that the principle of rehabilitation is a primary consideration in sentencing deserters, where judges not only uphold justice but also emphasize guidance, discipline, and the reintegration of soldiers into their units. Factors such as the perpetrator's motives, duration of absence, cooperative attitude, and social and family conditions influence the severity of the sanctions imposed. This study recommends that military law enforcers pay greater attention to balancing legal and rehabilitative aspects in every decision, in order to support the professionalism and stability of Indonesia's military institutions.

Keywords: *Desertion, Military Law, Principle of Rehabilitation*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Ahtmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Ahtmad Yani Yogyakarta